



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	: 23 (dua puluh tiga)
Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: V
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan RI.
Hari, Tanggal	: Selasa, 7 Juni 2022
Pukul	: 14.00 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Pimpinan Rapat	: Faisol Riza, S.S./Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta 10270
A c a r a	: 1. Pembahasan RKP dan RKA TA 2023; dan 2. Mengenai minyak goreng dan kebutuhan bahan pokok.
Hadir	: 1. 41 orang dari 55 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Menteri Perdagangan RI, Muhammad Lutfi. beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan RI pada pukul 15.52 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada hari Selasa, 7 Juni 2022, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Ketua Komisi VI DPR RI, Faisol Riza.

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu Indikatif Kementerian Perdagangan RI Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp2.140.206.191.000 (*Dua Triliun Seratus Empat Puluh Miliar Dua Ratus Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Program Perdagangan Dalam Negeri sebesar Rp485.000.991.000 (*Empat Ratus Delapan Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*).
 - b. Program Perdagangan Luar Negeri sebesar Rp377.667.455.000 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah*).
 - c. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp1.277.537.745.000 (*Satu Triliun Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*).

2. Komisi VI DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran 2023 sebesar Rp459.661.160.000 (*Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah*) untuk dapat mendukung pencapaian target kinerja 2023 yang terdiri atas :
 - a. Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat dan Bantuan Sarana Perdagangan;
 - b. Penyelenggaraan ITPC Baru, Pemindahan Kantor Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri, serta Kegiatan Promosi di Luar Negeri Pasca Pandemi;
 - c. Penyelenggaraan Akademi Metrologi;
 - d. Peningkatan Pengawasan Internal dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan;
 - e. Peningkatan Pelayanan Kalibrasi;
 - f. Peningkatan Pelayanan Pengujian Mutu Barang;
 - g. Peningkatan Tertib Ukur;
 - h. Pengembangan Kebijakan dan Pemberdayaan Konsumen;
 - i. Standardisasi dan Pengendalian Mutu;
 - j. Sosialisasi, Edukasi, Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi;
 - k. Revitalisasi BAPPEBTI.

3. Komisi VI DPR RI mendesak Kementerian Perdagangan RI agar melakukan optimalisasi pengawasan distribusi dan pengendalian harga minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya di seluruh wilayah Indonesia hingga sesuai dengan HET.
4. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian Perdagangan RI untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 18.27 WIB.

MENTERI PERDAGANGAN RI

Ttd.

MUHAMMAD LUTFI

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**

Ttd.

**FAISOL RIZA
A-33**